

AKTIVITAS PENGENDALIAN MUTU JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BEBERAPA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI PALEMBANG)

Novrantio Natael Sinambela, Yulia Saftiana dan Umi Kalsum

Universitas Sriwijaya, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, novrantios@gmail.com

Universitas Sriwijaya, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, ysaftiana@yahoo.com

Universitas Sriwijaya, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, umikalsum@unsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : untuk mengamati Aktivitas Pengendalian Mutu pada Jasa Audit Laporan Keuangan pada beberapa Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek dalam penelitian ini, membandingkan Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan mencari tahu tindakan apa yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik jika terjadi penyimpangan.

Tujuan yang dicapai: Bahwa Aktivitas Pengendalian Mutu pada Jasa Audit Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai jika terjadi penyimpangan dari standar.

Metodologi: Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, populasi 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) dan sampel sebanyak 5 KAP, Teknik pengumpulan data dengan Teknik wawancara mendalam atau depth interview dan Teknik analisis data dengan memilih, merangkum, mendeskripsikan, menyajikan, membandingkan dan mengambil kesimpulan.

Temuan: Ada beberapa Kantor Akuntan Publik yang belum menerapkan Dokumentasi pada Hasil Konsultasi dan Hasil Evaluasi Kinerja Auditor

Keterbatasan penelitian: KAP yang menjadi objek penelitian merupakan KAP ukuran yang kecil sehingga Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan tidak seluas dengan yang ditentukan oleh Institut KAP dan prosedur yang ada tidak seluas KAP yang ada di Kota besar.

Originality dalam penelitian ini: -

Kata Kunci : Auditing, Aktivitas Pengendalian Mutu, Sistem Pengendalian Mutu,

PENDAHULUAN

Menurut (Agoes, 2012) “Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Dengan demikian Auditing penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan – catatan pembukuan serta membandingkan dengan bukti – bukti yang ada agar diperoleh opini tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Setelah mendapat opini kewajaran dalam laporan keuangan tersebut maka pemegang saham dapat mempercayai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dan pihak manajemen juga dapat mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kondisi perusahaan.

Menurut Mulyadi, mengemukakan bahwa, “Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar standar yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik” (Mulyadi, 2002). Auditor Independen ini tergabung dalam satu instansi / organisasi yang bernama Kantor Akuntan Publik, dimana nantinya saat suatu perusahaan ingin menggunakan jasa Auditor Independen harus

menghubungi Kantor Akuntan Publik. Menurut Arens Kantor Akuntan Publik adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang jasa. Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik dapat berupa jasa audit kepatuhan, audit operasional dan audit laporan keuangan (Arens, Elder dan Beasley, 2012).

Namun sering kita jumpai bahwa Laporan Keuangan yang sudah di audit pun ternyata tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan adanya hubungan antara klien dengan auditor independen yang mengauditnya dan kurangnya sikap skeptisisme dari Auditor independen dalam memeriksa Laporan Keuangan. Menurut Wahyudiono Sistem Pengendalian Mutu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan (Wahyudiono, 2000). Menurut SPAP (2011), dalam SPM seksi 100 No. 03 menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem Pengendalian Mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP.

Menurut SPAP (2011) dalam SPM seksi 100 No 07 terdapat sembilan unsur prosedur dalam penerapan pengendalian mutu di suatu Kantor Akuntan Publik, yaitu : (1) Independensi, (2) Penugasan Personel, (3) Konsultasi, (4) Supervisi, (5) Pemekerjaan, (6) Pengembangan profesional, (7) Promosi, (8) Penerimaan dan keberlanjutan klien dan (9) Inspeksi. Dalam penerapan sistem pengendalian mutu, kesembilan unsur tersebut saling mempengaruhi.

Dalam menerapkan Sistem Pengendalian Mutu Audit ini diperlukan adanya Aktivitas Pengendalian Mutu Audit. Aktivitas Pengendalian mutu audit terdiri dari dua unsur yaitu: Aktivitas Pengendalian dan Mutu Audit sebagai objek yang dikendalikan. Aktivitas pengendalian merupakan suatu proses yang sedikitnya memiliki empat langkah yaitu: (1) Penetapan Tujuan dan Standar (2) mengukur kinerja aktual (3) membandingkan hasil pengukuran dengan tujuan atau standar (4) mengambil tindakan kolektif yang dipandang perlu (Schermerhon, 2002).

Dalam Pengendalian Mutu Jasa Audit ini diperlukan adanya pengamatan terhadap Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit, sehingga nantinya Kantor Akuntan Publik dapat mengoreksi kesalahan dalam Prosedur Pengendalian mutu dan dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Palembang yang merupakan Kantor Akuntan Publik milik sendiri sehingga kebijakan dan prosedurnya dapat diketahui lebih luas dan mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengambil Judul “**Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan (Studi Kasus pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Palembang)**”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keprilakuan

Dalam Hubungannya dengan Aktivitas Pengendalian Mutu, ketika seorang auditor bersikap independen dengan tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari konflik kepentingan dalam melakukan audit maka hal tersebut dapat mempertahankan Mutu dari Kantor Akuntan Publik, begitu juga sikap auditor yang berkeinginan meningkatkan kemampuan audit yang dimilikinya dengan mengikuti berbagai pengembangan personel agar meningkatkan Kompetensinya dan mengikuti berbagai arahan tugas yang diberikan oleh supervisor serta berkonsultasi jika menemui masalah yang sulit.

Ketika perilaku seorang Akuntan Publik junior dalam menanggapi promosi yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik dengan tujuan memotivasi Auditor untuk selalu meningkatkan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang Auditornya. Dan bagaimana sikap auditor dalam menanggapi setiap Evaluasi dan masukan yang diberikan oleh Supervisor atau senior Auditor.

Sistem Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu pada Kantor Akuntan Publik berpedoman pada Sistem Pengendalian Mutu yang ditentukan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki Sistem Pengendalian Mutu dan menjelaskan unsur – unsur pengendalian mutu dan hal – hal terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik harus diterapkan oleh setiap kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit, atestasi, akuntansi, *review*, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntansi (SPAP).

Menurut SPAP (2011) dalam SPM seksi 100 (PSPM No.1) menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu terdiri dari 9 Unsur yaitu: 1) Independensi, 2) Penugasan Personel, 3) Konsultasi, 4) Supervisi, 5) Pemekeraan (*Hiring*), 6) Pengembangan profesional, 7) Promosi, 8) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien, serta 9) Inspeksi.

Independensi

Independensi Sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri Akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. Independensi Penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa Akuntan publik bertindak Independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Penugasan Personel

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) Penugasan Personel merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personel. Kebijakan dan Prosedur ini digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam penugasan personel, sifat dan ruang lingkup supervisi harus dipertimbangkan. Umumnya, apabila personel yang ditugaskan semakin cakap dan berpengalaman, maka supervisi secara langsung terhadap personel tersebut, semakin tidak diperlukan.

Konsultasi

Konsultasi Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) merupakan suatu kebijakan atau dialog yang memberikan keyakinan bahwa personel akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, Kompetensi, Pertimbangan yang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan.

Supervisi

Menurut Terry dalam Hidayat (2008) mendefinisikan Supervisi bahwa, Supervisi adalah usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara mendayagunakan bakat atau kemampuan alami manusia dan sumber – sumber yang memfasilitasi yang ditekankan pada pemberian tantangan dan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap bakat atau kemampuan alami manusia. Supervisi ini diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Standar Pekerjaan Lapangan yang pertama yang berbunyi : “Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”

Pemekeraan (*Hiring*)

Pemekeraan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011;17000.9) merupakan kebijakan yang dibuat Kantor Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan bahwa karyawan yang dipekerjakan mempunyai pengetahuan dan karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Akhirnya, mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik tergantung pada Integritas, Kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekeraan Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik.

Pengembangan Profesional

Pengembangan Profesional menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) merupakan kebijakan dan prosedur mutu mengenai pengembangan profesional personel yang memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi Tanggung jawabnya. Pendidikan Profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan sarana bagi Kantor Akuntan Publik untuk memberikan kepada personilnya pengetahuan memadai untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan kemajuan karier mereka di Kantor Akuntan Publik.

Promosi

Saat ini organisasi yang tengah berkembang memiliki tantangan untuk dapat mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya, dimana melakukan pengembangan karyawan merupakan salah satu bagian dari tantangan tersebut (Antonacopolou, 2000). Promosi menurut Standar Professional Akuntan Publik (2011) merupakan kebijakan dan prosedur mutu mengenai pengembangan professional personel yang memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.

Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

Dalam Penerimaan dan Keberlanjutan Klien bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP untuk menetapkan prosedur dengan tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk menentukan integritas atau kendala klien, dan tidak juga berarti bahwa KAP berkewajiban kepada siapa pun, kecuali pada dirinya untuk menerima, menolak dan mempertahankan kliennya. Namun dengan berdasarkan pada prinsip pertimbangan hati – hati, KAP disarankan Selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya.

Inspeksi

Inspeksi menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) adalah prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap elemen Sistem Pengendalian Mutu efektif dilaksanakan. Prosedur Inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen Kantor Akuntan Publik. Jenis Prosedur Inspeksi yang akan digunakan tergantung kepada pengendalian yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik dan penetapan Tanggung Jawab di Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam suatu Organisasi atau Perusahaan sehingga nantinya didapatkan Gambaran menyeluruh untuk pemecahan masalah dari fenomena tersebut

Sumber dan Jenis data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan Data Sekunder, Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Sekaran, 2011)

Sedangkan Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

Objek Penelitian

Pemilihan objek ini didasarkan atas kedudukan Kantor Akuntan Publik milik sendiri bukan merupakan cabang Kantor Akuntan Publik dari daerah lain cabang karena kebijakan dan prosedurnya dapat diketahui lebih luas dan hanya menggunakan 5 Kantor Akuntan Publik untuk menghemat waktu dikarenakan penelitian bersifat Studi kasus sehingga harus dilakukan

pengamatan mendalam melalui wawancara. Kantor Akuntan Publik yang menjadi Objek dalam penelitian ini antara lain adalah :

Tabel 1.1
Daftar Sampel

No	Nama Kantor	Alamat	No. Telp
1	KAP Drs. Achmad Djunaidi B	Jl. Letkol Iskandar No.679 Lantai III, 15 Ilir Timur 1	(0711) 357148, 357138, 7017335
2	KAP Drs. Achmad Rifai & Bunyamin	Jl. Candi Angkoso / Veteran No. 324 F RT 008 / 002	(0711) 361751, 311746
3	KAP Drs. Charles Panggabean & Rekan	Jl. Kebon Jahe No. 569, 18 Ilir – Ilir Timur I	(0711) 366026, 370245
4	KAP Drs. Tanzil Djunaidi	Jl. Dr. M. Isa No. 1117 Palembang 30114	(0711) 320492
5	KAP Drs. Ahmad Nuroni	Jl. Sapta Marga 101 A, Palembang 30114	(0711) 9254066

Sumber : Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia 2017

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam Wawancara ini peneliti akan menggunakan pertanyaan “Apa (*What*)”, “Mengapa (*Why*)”, dan “Bagaimana (*How*)”, karena ketiga pertanyaan tadi paling cocok untuk digunakan dalam studi kasus. Tetapi menurut Yin penggunaan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” lebih penting, karena kedua pertanyaan tersebut dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang dikaji (Yin, 2003).

Dokumentasi

Pengambilan data melalui Studi Dokumentasi ini dengan cara membaca literatur – literatur yang ada yang berhubungan dengan Topik penelitian, dengan membaca literatur – literatur yang ada diharapkan dapat membantu peneliti menemukan pemecahan masalah dan kesimpulan dari fenomena yang diteliti dan peneliti juga melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen Kantor Akuntan yang berhubungan dengan penelitian jika diperkenankan oleh Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Memilih, merangkum dan mendeskripsikan data atau informasi yang telah diperoleh dari informan yang kemudian difokuskan pada masalah yang akan diteliti tentang Aktivitas pengendalian mutu jasa Audit pada Kantor Akuntan Publik dalam menerapkan Pengendalian Mutu atas Jasa Audit yang diberikan
2. Menyajikan data tentang Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit yang di lakukan oleh Kantor Akuntan Publik, data ini disampaikan dalam bentuk uraian singkat yang dideskripsikan dalam bentuk naratif
3. Penarikan kesimpulan wawancara dan analisis data mengenai unsur – unsur penerapan Sistem Pengendalian Mutu yang ada di Kantor Akuntan Publik dan cara penerapan Pengendalian Mutu Jasa Audit pada Kantor Akuntan Publik
4. Membandingkan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi mengenai Aktivitas Pengendalian Mutu di Kantor Akuntan Publik yang dengan Sistem Pengendalian Mutu yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik
5. Menyajikan data tentang perbandingan penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik dengan Sistem Pengendalian yang terdapa dalam SPAP ke dalam bentuk uraian singkat yang dideskripsikan dalam bentuk naratif dan tabel
6. Penarikan Kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan hasil perbandingan dan analisis data mengenai Kesesuaian penerapan Sistem Penedalihan Mutu di Kantor Akuntan Publik dengan Sistem Penendalian Mutu yang ditetapkan oleh IAPI dan Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atas penyimpangan Standar ata Kebijakan. Jika

ditemukan ketidaksesuaian pada penerapan Sistem Pengendalian Mutu akan di analisis dan dicari penyebabnya dan bagian yang tidak sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan berdasarkan Standar Pengendalian Mutu yang di tentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Independensi

Independensi yang diterapkan pada 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian sudah sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan jenis Independensi yang diterapkan oleh 5 Kantor Akuntan publik adalah sama yaitu Independensi dalam kenyataan atau fakta dan Independensi dalam penampilan dimana penerapan Independens dipandang penting karena seorang auditor harus memiliki kejujuran dan kebebasan sikap dalam menentukan opini kewajaran Laporan Keuangan dan auditor juga harus membebaskan diri dari segala kepentingan yang ada agar opini dan rekomendasi yang diberikan auditor dapat dipercaya oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan klien, Independensi ini memang secara umum diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik di Indonesia.

Dalam mengevaluasi Independensi yang dimiliki oleh personil audit maka 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian menerapkan evaluasi yang berbeda, dimana ada yang melakukan wawancara dan pengamatan saja, ada yang melakukan wawancara saja dan ada juga yang melakukan wawancara, pengamatan dan pemberian kuesioner kepada personil audit untuk menilai tingkat independensi yang dimiliki oleh auditor. Pada intinya evaluasi ini sama dimana Kantor Akuntan Publik ingin memastikan bahwa setiap personil audit memiliki sikap Independensi dan menolak segala pengaruh dari perusahaan klien dan Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian melakukan pembaharuan daftar klien yang akan di audit oleh tim audit dan memisahkan antara personil yang melakukan audit dengan personil yang melakukan *consulting service* agar tidak adanya hubungan dekat antara personil audit dan perusahaan klien yang nantinya dapat mempengaruhi Independensi dan Objektivitas yang dimiliki oleh auditor sehingga dapat mengurangi kepercayaan yang dimiliki oleh pihak – pihak eksternal.

Jika terjadi penyimpangan dalam prosedur Independensi maka 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek melakukan teguran secara langsung kepada pihak yang bersangkutan serta menanyakan alasan melakukan pelanggaran tersebut

b. Penugasan Personel

Penugasan personel yang diterapkan oleh 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Kantor Akuntan Publik dimana penugasan personil ini meliputi perencanaan perikatan dan penentuan tim audit agar memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Adanya diskusi mengenai pendistribusian tugas kepada personil audit untuk menentukan kesesuaian antara kompetensi dan pengalaman yang dimiliki personil audit dengan perikatan audit yang diterima dan tugas yang diberikan dapat menambah pengalaman yang dimiliki oleh personil audit serta perlunya perencanaan perikatan karena setiap penugasan audit harus benar – benar direncanakan secara matang. Namun 2 dari 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian langsung mendelegasikan tugas kepada Ketua tim audit tanpa berunding dengan manajer dan *partner* atau pimpinan, walaupun Ketua Tim Audit yang diberikan wewenang telah memiliki pengalaman untuk tugas tersebut namun ada baiknya jika sebelum perikatan adanya perundingan mengenai kesesuaian personil audit dan tugas yang diberikan agar nantinya tidak ada kesalahan yang fatal.

Jika terjadi penyimpangan dalam prosedur penugasan personel maka Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek akan memberikan teguran secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan memperbaiki berbagai penyimpangan – penyimpangan yang ada. Jika kesalahan yang disebabkan tidak dapat ditoleransi maka hukuman akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

c. Konsultasi

Melalui prosedur Konsultasi yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik dapat memenuhi kebutuhan Kantor Akuntan Publik dalam meningkatkan kompetensi serta pengalaman yang dimiliki oleh personil audit. Dalam konsultasi ini juga mendiskusikan tentang opini dan rekomendasi yang dibuat oleh personil audit agar opini dan rekomendasi yang dibuat pada draft final dapat diyakini kebenarannya. Namun dari Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian masih ada yang belum menerapkan dokumentasi atas hasil konsultasi ini, ada baiknya diterapkan dokumentasi atas hasil konsultasi karena tidak perlu dilakukan konsultasi lagi jika masalah yang sama terulang kembali karena sudah ada arsip mengenai hasil konsultasi masalah yang sama sehingga prosedur konsultasi efektif dan efisien.

Jika terjadi perbedaan pendapat antara personil konsultasi dengan personil audit maka Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian akan menyerahkan pemecahan masalah tersebut kepada pihak yang tingkatannya lebih tinggi untuk mencari jalan tengah dari perbedaan pendapat tersebut dan menghasilkan pendapat yang realistis dan tidak memihak salah satu pihak. Ini dikarenakan personil yang tingkatannya lebih tinggi cenderung memiliki kompetensi dan pengalaman yang lebih serta memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu dikarenakan posisinya dalam Kantor Akuntan Publik serta bersifat objektif. Faktor – faktor yang menyebabkan adanya konsultasi pada 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek berbeda dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing Kantor Akuntan Publik berbeda – beda.

d. Supervisi

Dalam supervisi ini mempertahankan standar mutu yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek dengan menjaga integritas dan objektivitas dalam setiap penugasan audit dan memastikan bahwa personil audit telah bersikap Independen agar memperoleh keyakinan dari berbagai pihak serta melakukan setiap perikatan aduti sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian juga melakukan *review* Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Perikatan untuk memastikan bahwa temuan – temuan, opini dan rekomendasi serta laporan yang dihasilkan oleh personil audit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik dan Institut Akuntan Publik Indonesia, jika adanya kesalahan maka akan dilakukan berbagai perbaikan terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Perikatan yang diarahkan oleh seorang supervisor. Jika terjadi penyimpangan dalam prosedur supervisi ini maka Kantor Akuntan Publik akan memberikan teguran secara langsung kepada pihak yang bersangkutan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

e. Pemekeraan

Pemekeraan yang diterapkan oleh 5 Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh Institut Akuntan dimana prosedur yang diterapkan dapat memberikan keyakinan bahwa karyawan yang dipekerjakan mempunyai pengetahuan dan karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Prosedur pemekeraan pada Kantor Akuntan Publik terdiri atas proses perekrutan karyawan yaitu seleksi secara administratif, tes secara tertulis dan wawancara tetapi ada juga Kantor Akuntan Publik yang menerapkan penerimaan atas rekomendasi dari pimpinan atau *partner* dikarenakan jika calon auditor tersebut direkomendasikan oleh pimpinan atau *partner* kemungkinan besar ia memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjadi auditor di Kantor Akuntan Publik. Wawancara juga bertujuan agar Kantor Akuntan Publik dapat mengetahui karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh calon auditor dan tes tertulis berfungsi untuk melihat sejauh mana pengetahuan calon auditor tentang akuntansi dan pengauditan. 2 dari 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek menerapkan masa uji coba terhadap calon auditor selama 3 bulan.

f. Pengembangan personel

Pengembangan personel yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dimana Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek telah mewajibkan dan memotivasi personil audit untuk mengikuti pelatihan dan seminar agar memiliki pengetahuan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan menunjang kemajuan karier mereka, Kantor Akuntan

Publik juga menetapkan standar SKP yang harus dimiliki oleh auditor dimana untuk auditor harus memiliki 32 SKP sedangkan untuk auditor yang telah memiliki sertifikat *Certified Public Accountant* harus memiliki 40 SKP dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh personil audit dan dapat memenuhi tanggung jawabnya selama proses perikatan dan Kantor Akuntan Publik juga melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan seminar yang diikuti oleh auditor, hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh auditor setelah mengikuti pelatihan.

g. Promosi

Promosi yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dimana terdapat prosedur promosi yang diterapkan telah dapat memotivasi personil audit untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman yang ia miliki untuk agar dapat memperoleh promosi untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi. Dan adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai dasar penilaian untuk pemberian promosi kepada personil audit tetapi dari objek penelitian masih ada yang tidak menerapkan dokumentasi untuk hasil evaluasi kinerja ini, padahal ini sangat bermanfaat sebagai dasar bagi Kantor Akuntan Publik memberikan promosi kepada personil audit sehingga promosi yang diberikan meyakinkan. Jika terdapat personil yang tidak meningkatkan kemampuannya setelah di promosi maka akan ditegur secara langsung oleh pimpinan atau *partner* Kantor Akuntan Publik sehingga yang bersangkutan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan apa yang dipercayakan.

h. Penerimaan dan Keberlanjutan

Prosedur penilaian ini sangat penting untuk meyakinkan auditor bahwa manajemen perusahaan dapat dipercaya dan penilaian tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan menerima atau menolak perikatan yang nantinya dapat mengatasi resiko – resiko yang ada, jika dari hasil penilaian menunjukkan bahwa manajemen memiliki latar belakang yang buruk dan integritas manajemen yang buruk maka Kantor Akuntan Publik berhak untuk menolak perikatan. Prosedur penerimaan dan Keberlanjutan yang diterapkan oleh 5 Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek pada intinya sama. Jika terjadi penyimpangan pada prosedur penilaian dalam Penerimaan dan Keberlanjutan maka Kantor Akuntan Publik akan melakukan penilaian ulang terhadap perusahaan klien, berlanjutnya perikatan tergantung dari hasil penilaian ulang ini.

i. Inspeksi

Inspeksi yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dimana Inspeksi yang dilaksanakan dapat menjamin bahwa setiap elemen Sistem Pengendalian Mutu efektif dan efisien pelaksanaannya, personil yang melakukan inspeksi ini bertindak mewakili kepentingan manajemen Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Adanya tahapan – tahapan yang baik dan teratur untuk memastikan bahwa tujuan dari inspeksi tercapai. Jika terdapat kesalahan dalam Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan maka Kantor Akuntan Publik akan mengadakan perbaikan terhadap prosedur nya maupun personilnya agar kesalahan yang ada tidak terus – menerus diulangi untuk diterapkan. Jika terdapat penyimpangan dalam prosedur Inspeksi ini maka Kantor Akuntan Publik akan melakukan revisi pada isi program inspeksi dan mengevaluasi personil yang melaksanakan Inspeksi terkait penyimpangan dalam inspeksi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh 5 Kantor Akuntan Publik di Palembang kesimpulan yang dapat diambil bahwa Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Sistem Pengendalian Mutu yang ditentukan oleh Institut Kantor Akuntan Publik dikarenakan adanya penginformasian dan pemantauan terhadap Kantor Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia tetapi dikarenakan ukuran Kantor Akuntan Publik yang masih kecil sehingga ruang lingkup dari Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan tidak begitu luas.

KETERBATASAN DAN *FUTURE RESEARCH*

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak adanya dokumentasi mengenai Prosedur Supervisi, Prosedur Penerimaan dan Keberlanjutan, prosedur Inspeksi dan Prosedur Penugasan personel dikarenakan data tersebut merupakan rahasia Kantor Akuntan Publik sehingga data – data yang didapat mengenai prosedur diatas berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti.
2. Data yang didapatkan hanya melalui wawancara secara langsung dan kuesioner yang diberikan sehingga tidak adanya observasi langsung ke Kantor Akuntan Publik dan pengecekan secara rinci dokumen – dokumen yang dimiliki.
3. Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian merupakan Kantor Akuntan Publik ukuran yang kecil sehingga Sistem Pengendalian Mutu yang diterapkan tidak seluas dengan yang ditentukan oleh Institut Kantor Akuntan Publik dan prosedur yang ada tidak seluas Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota besar.
4. Jumlah Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian ini berjumlah 5 Kantor Akuntan Publik sehingga hasil dari penelitian ini tidak mewakili keseluruhan Kantor Akuntan Publik yang ada di Palembang hanya yang menjadi objek penelitian saja.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno, 2012. Auditing (Pemeriksaan Akuntan), Edisi 2, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., & Syarif, N. (2008). *AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PEKERJAAN LAPANGAN AUDIT*.
- Arens, A. A., R. J. Elder, dan M. S. Beasley. 2010. Auditing and Assurance Service An Integrated Approach, 13th Edition. New Jersey: Pearson Education Limited.
- Arens, A. A., R. J. Elder, dan M. S. Beasley. 2012. Auditing and Assurance Service An Integrated Approach, 14th Edition. England: Pearson Education Limited.
- Ayu, G., Anggraeni, N., & Badera, I. D. N. (2013). *PADA KINERJA AUDITOR DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK PROVINSI BALI* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali.
- Christiawan, Yulius Jogi. (2003). *Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan Historis*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.7 No.1, Mei 2005 : 61-88
- Donnelly, David P., Quirin J.J, O'Bryan, D., 2003, "*Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics*", *Behavior Research In Accounting Vol. 15, 2003*, hal 87-110.
- [Antonacopoulou](https://doi.org/10.1108/sbr.2012.29607aaa.002), Elena P. (2000) "2000 Awards for Excellence", *Society and Business Review*, Vol. 7 Issue: 1, <https://doi.org/10.1108/sbr.2012.29607aaa.002>. Di Akses pada tanggal 7 November 2017
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hidayat, Taufik. 2008. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi dan Tindakan Supervisi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior Kantor Akuntan Publik". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN, Jakarta.
- Hidayati, Ataina. 2002. *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keprilakuan : Berbagai Teori dan Pendekatan yang Melandasi*. Journal JAAI VOLUME 6 NO. 2, DESEMBER 2002 , ISSN: 1410 – 2420.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011), "Standar Profesional Akuntan Publik", Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Direktori 2017. (<http://iapi.or.id>). Diakses : 12 Maret 2017. Diakses pada 10 Oktober 2017
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku 1*, Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat.
- Rachmawati, Andri dan Hanung Triatmoko. 2007. "Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, 26 – 28

Juli

- Schermerhorn, Jhon R. 2002, *Management*, 7th Edition, New York: John Willey & Sons, Inc.
- Studi, P., Jurusan, A., Ekonomi, F., & Dharma, U. S. (2016). Evaluasi sistem pengendalian mutu audit di kantor akuntan publik Studi Kasus di Kantor Akuntan Publik Payamta (Akuntansi, Ekonomi, Ilmu, Islam, & Syarif, 2008)
- Supriyono, 2000, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE
- Sekaran, Uma 2011, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Wahyudiono, Bambang. 2000. *Evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada KAP H dan M*. Tesis dipublikasikan. Sekolah tinggi Akuntansi Negara. Jakarta
- Wibowo, Bagus, 2007. *Penilaian Kepatuhan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Standar Auditing dan Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) Studi Kasus pada enam Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Universitas Diponegoro.
- Yin, Robert K., 2003, *Case Study Research: Design and Methods*, Revised Edition, Sage Publications, The International Professional Publisher, London.

TENTANG PENULIS

<p>Penulis Utama Novrantio Natael Sinambela,</p> <p>Penulis berasal dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Ketertarikan beliau pada bidang ilmu Auditing terutama pada topik Sistem Pengendalian Mutu</p> <p>Penulis dapat dihubungi di email: novrantios@gmail.com</p>	<p>Penulis Kedua Yulia Saftiana</p> <p>Penulis berasal dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Ketertarikan beliau pada bidang ilmu Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Manajemen, Auditing terutama pada topik Sistem Pengendalian Mutu</p> <p>Penulis dapat dihubungi di email: ysaftiana@yahoo.com</p>
<p>Penulis Ketiga Umi Kalsum</p> <p>Penulis berasal dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Ketertarikan beliau pada bidang ilmu Akuntansi Keuangan, Auditing dan Perpajakan terutama pada topik Sistem Pengendalian Mutu</p> <p>Penulis dapat dihubungi di email: umikalsum@unsri.ac.id</p>	

LAMPIRAN: Kuesioner Wawancara Penelitian
“AKTIVITAS PENGENDALIAN MUTU JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN”

Narasumber :
Pewawancara : Novrantio Natanael Sinambela
Waktu :
Lokasi :

1. Apakah semua personil diwajibkan pada setiap tingkat organisasi untuk mematuhi ketentuan Independensi sebagaimana diatur oleh IAI ?
 Ya Tidak
2. Apakah Kantor Akuntan Publik menerapkan Independensi pada setiap Tingkat Organisasi Kantor Akuntan Publik ?
 Ya Tidak
3. Apakah Kantor Akuntan Publik Menyiapkan dan selalu Memperbaharui daftar klien yang diinformasikan kepada personil sebagai dasar untuk menentukan Independensi mereka ?
 Ya Tidak
4. Apakah dilakukan pemisahan antara Personil Audit terhadap personil yang melakukan Consulting Service terhadap Klien ?
 Ya Tidak
5. Apakah terdapat Konsultasi pada Kantor Akuntan Publik ?
 Ya Tidak
6. Apakah Kantor Akuntan Publik menentukan individu sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan konsultasi ?
 Ya Tidak
7. Apakah personel audit melakukan konsultasi dengan sumber atau pihak yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa ?
 Ya Tidak
8. Apakah ada penunjukan satu atau lebih personil yang bertindak sebagai spesialis yang berwenang dlm konsultasi ?
 Ya Tidak
9. Apakah terdapat Dokumentasi Terhadap hasil konsultasi mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultasi ?
 Ya Tidak
10. Apakah Supervisor sudah mengarahkan personel dengan instruksi yang tepat ?
 Ya Tidak
11. Apakah Kantor Akuntan Publik mengevaluasi orang – orang yang potensial untuk dipekerjakan pada semua tingkat profesional ?
 Ya Tidak
12. Apakah terdapat program pengembangan profesional di Kantor Akuntan Publik ?
 Ya Tidak
13. Apakah Program pengembangan profesional dikomunikasikan kepada personel ?
 Ya Tidak
14. Apakah Informasi tentang perkembangan terkini dalam standar profesional, materi mengenai kebijakan dan prosedur teknis Kantor Akuntan Publik dikomunikasikan kepada Personil Audit secara rutin?
 Ya Tidak
15. Apakah Staf Supervisor menjaga informasi tentang isu – isu penting yang sedang dihadapi ?
 Ya Tidak
16. Apakah terdapat Pelatihan di Tempat Kerja selama pelaksanaan perikatan ?
 Ya Tidak
17. Apakah Secara periodik Kantor Akuntan Publik memberitahu personil mengenai kemajuan mereka?
 Ya Tidak
18. Apakah kinerja dari personel yang di promosikan sudah sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh Kantor Akuntan Publik?
 Ya Tidak
19. Apakah unsur promosi dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan Standar Mutu nya dan dapat menerima tanggung jawab yang lebih tinggi setelah di promosikan?
 Ya Tidak
20. Apakah KAP menyelenggarakan Arsip yang memuat dokumentasi mengenai proses evaluasi kinerja mereka ?
 Ya Tidak
21. Apakah terdapat prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien pada Kantor Akuntan Publik?
 Ya Tidak
22. Apakah terdapat penyajian laporan temuan inspeksi dan tindakan pemantauan yang dilaksanakan atau direncanakan kepada tingkat manajemen yang semestinya ?
 Ya Tidak
23. Apakah Kantor Akuntan Publik menetapkan batas lingkup dan isi program Inspeksi pada KAP ?
 Ya Tidak